



**PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA DINAS BADAN PENGELOLAHAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Disajikan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO
NPM 1515100113

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO
NPM : 1515100113
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA DINAS BADAN
PENGELOLAHAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA PROGRAM STUDI

(JUNAWAN, S.E., M.SI)
ANGGOTA II

MEDAN, NOVEMBER 2019
ANGGOTA I

(RAHIMA Br. PURBA, SE., M.Si, Ak., CA)
ANGGOTA III

(HASRUL AZWAR HSB, S.E., MM)

(ANGGI PRATAMA NST, S.E., M.Si)

ANGGOTA IV

(AULIA, S.E., M.Si)



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO
NPM : 1515100113
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA DINAS BADAN
PENGELOLAHAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

MEDAN, NOVEMBER 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(JUNAWAN, SE., M.SI)

PEMBIMBING I

(RAHIMA Br. PURBA, SE., M.Si, Ak., CA)

DEKAN

(Dr. SURYA NITA, SH., M.Hum)

PEMBIMBING II

(HASRUL AZWAR HSB, SE., MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO
NPM : 1515100113
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS
Judul Skripsi : PENGARUH REALISASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PADA DINAS BADAN
PENGELOLAHAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non – Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, formatikan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2019




Bobby Syahputra Siringo-ringo
NPM 1515100113

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO
NPM : 1515100113
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS
Judul Skripsi : PENGARUH REALISASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PADA DINAS BADAN
PENGELOLAHAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai
dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2019



Bobby Syahputra Siringo-ringo
NPM 1515100113

Hal : Permohonan Meja Hijau

Telah di terima berkas persyaratan dapat di proses Medan, 06/11/2019
Ka. BPAA
an. *Adehair*

Medan, 06 November 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme 53%
06 NOV 2019
AN. *Tharmizi Hakim*
THARMIZI HAKIM

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 02 Oktober 1993
Nama Orang Tua : AMRAH SIRINGO-RINGO
N. P. M : 1515100113
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082165350756
Alamat : Jl. Tanjung Sari

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilagalsir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
UKT 50%	Kp	2.625.000 +
	Rp	4.725.000

Periode Wisuda Ke : 64
Ukuran Toga : M
06/11/2019



Hormat saya
Bobby Syahputra Siringo
BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO
1515100113

- * 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- * 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (kali) - NPs. ybc.



"BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO_1515100113_AKUNTANSI.docx"



Resolbit diakt:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite, Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 87% words: 1225 <http://www.wikipedia.org/wiki/Indonesian>
- 24% words: 2572 <http://www.wikipedia.org/wiki/Indonesian>
- 20% words: 2625 <http://www.wikipedia.org/wiki/Indonesian>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 02 Oktober 1993
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1515100113
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Nilai Kredit yang telah dicapai	: 125 SKS, IPK 3.10

yang ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Pengaruh Realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	<input checked="" type="checkbox"/>
Analisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah (studi kasus pada dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara)	<input type="checkbox"/>
Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang (studi empiris pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia)	<input type="checkbox"/>

yang telah disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 21 Januari 2019
Pemohon,

(Bobby Syahputra Siringo)

Nomor :
Tersurat :

Disahkan oleh
 Dekan
 (Dr. Surya Hita, S.P., M.Hum.)

Tanggal : 21 Januari 2019
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 21 Januari 2019
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

 (Rahma P. Purba, SE, M.Si Ak. CA)

Tanggal : 21 Januari 2019
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

 (Hasni Arwan Hub, SP, MMT)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 21 Januari 2019 12:24:51



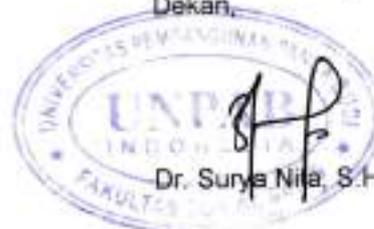
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : RAHIMA BR. PURBA, SE., M.Si, AK., CA
 Dosen Pembimbing II : HASRUL AZWAR HSB., SE., MM
 Nama Mahasiswa : BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100113
 Bidang Pendidikan : Si
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada dinas Badan Pengelolahan Pajak dan Retribusi daerah perempus

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9 - 2019.	Perbaikan Proposal.		
10 - 2019.	Run data SPSS dan Hasil Penelitian.		
10 - 2019.	Pembahasan, Kesimpulan & Saran, Daftar Pustaka.		
11 - 2019.	Acc sidang.		

Medan, 01 November 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nila, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : RAHIMA Br Purba, SE., M.Si, AK., CA
 Dosen Pembimbing II : HASRUL AZWAR HSB., SE., MM
 Nama Mahasiswa : BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100113
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik nama
 Kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas
 Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
7/11/19	<p>Lampirkan Kristaner</p> <p>Aze Sidang MH</p> <p>7/11/19</p>		

Medan, 01 November 2019

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahima br. Purba, SE, M.Si, Ak. CA
 Dosen Pembimbing II : HARVUL AZWAR HASIBUAN SE. MM
 Nama Mahasiswa : BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100113
 Bidang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada dinas pendapatan daerah Prov. Sumut

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
26/7/19	Tambahkan foto Kutipan 5 baris 1 spasi Ace Gunung 26/7/19	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	

Medan, 26 Juli 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

[Signature]
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



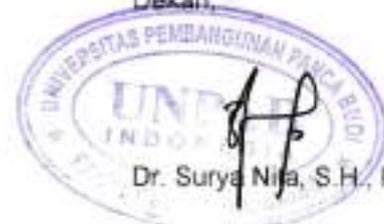
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahima Br. Purba, SE, M.Si, Ak.CA.
 Dosen Pembimbing II : Hazrul Azwar Hasibuan SE, MM.
 Nama Mahasiswa : BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100113
 Bidang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap upaya peningkatan pendapatan Asli daerah (PAD) pada dinas pendapatan daerah Prov. Sum.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
14/05/2019.	Latar belakang mslh, identifikasi mslh. Rumusan Masalah \leftrightarrow Tujuan \leftrightarrow Hipotesis (3?) (3?) (3?) - Definisi operasional. - populasi - Sampel.	<u>SL</u>	
15/05/2019.	Rumusan mslh \leftrightarrow Hipotesis. Definisi operasional. Teknik pengambilan sampel Identifikasi mslh.	<u>SL</u>	
16/05/2019.	Acc Seminar Proposal	<u>SL</u>	

Medan, 15 Mei 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nija, S.H., M.Hum.

Ace jilid lux
20/01-2020



**PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA DINAS BADAN PENGELOLAHAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Ace jilid lux
27/01 2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

BOBBY SYAHPUTRA SIRINGO-RINGO
NPM 1515100113

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, untuk menganalisa apakah pajak bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif/kuantitatif dengan pendekatan secara sistematis menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian uji t menunjukkan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan hasil uji t pajak bea balik nama kendaraan bermotor menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian uji f menunjukkan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze whether the motor vehicle tax has a significant effect on local revenue in the Office of the Regional Tax and Retribution Management Agency of North Sumatra Province, to analyze whether the motor vehicle title transfer tax has a significant effect on the region's original revenue at the Regional Tax and Retribution Management Agency North Sumatra Province. This study uses an associative / quantitative method with a systematic approach to answering the problem formulation. T test results showed that the motor vehicle tax had no significant effect on regional own-source revenues, while the results of the t-vehicle tax transfer tax test results showed that there was a significant effect on regional own-source revenue. The results of the f test show that motor vehicle tax and motor vehicle transfer tax have a significant effect on local revenue.

Keywords : *Motorized Vehicle Tax, Motorized Vehicle Transfer Fee Tax, Regional Original Revenue.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :”Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Badan Pengolahan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial & Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad. Isa Indrawan, S.E,M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial & Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak Junawan S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Ibu Rahima Br. Purba, SE., M.Si,Ak., CA selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Bapak Hasrul Azwar Hasibuan S.E, M.M selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.
6. Semua pendidik dan Dosen Fakultas Sosial & Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi penulis.
7. Bapak (Amran Siringo-ringo) dan Mamak (Siti Khadijah Br. Lubis) Saya yang telah membesarkan saya, mendidik saya, mendukung, dan membina saya, tidak hanya itu saya juga sangat berterima kasih atas kerja keras yang tak ternilai harganya dan menjadi penyemangat penulis dalam meraih cita-cita.
8. Kakak (Agustina Siringo-ringo dan Novita Siringo-ringo), abang (Kenny Siringo-ringo) dan Adek (Sri Darna Susanti Rangkuti) saya yang telah memberikan saya dukungan dan semangat untuk meraih cita-cita.
9. Teman-teman Akuntansi 2015, khususnya kelas Pagi B yang tidak dapat saya sebutin satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dan kebersamaan selama ini.
10. Pacar saya Leli Rahmawati Marpaung yang selalu membantu dan memberikan suport dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat saya Rahmat Hidayat, Prayugi dan Komal yang turut membantu dan selalu memberikan saya support dalam penulisan skripsi ini.
12. Terlebih untuk teman-teman saya yang memberikan waktunya lebih untuk kepentingan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terlebih untuk teman terdekat saya yang hingga saat ini selalu setia membantu saya,

membimbing saya, memberikan semangat, dukungan yang lebih untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan karya ini dan saran yang dapat berguna untuk menyempurnakan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Medan, November 2019

Penulis

Bobby Syahputra Siringo-ringo

NPM 1515100113

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	11
1. Pajak	11
2. Pajak Daerah.....	16
3. Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20
5. Pendapatan Asli Daerah.....	23
B. Penelitian Sebelumnya	28
C. Kerangka Konseptual	30
D. Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Definisi Operasional Variabel.....	33

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	42
1. Deskripsi Objek Penelitian	42
a. Sejarah Umum Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara	42
b. Struktur Organisasi	45
c. Uraian Tugas	48
2. Statistik Deskriptif	55
3. Pengujian Asumsi Klasik	57
4. Regresi Linier Berganda	61
5. Pengujian Hipotesis	63
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66
1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD	66
2. Pengaruh Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA DIRI

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	33
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.2 Tabulasi Per- Variabel	56
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas.....	59
Tabel 4.4 Uji Autokolerasi.....	61
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda	62
Tabel 4.6 Uji Parsial (T).....	63
Tabel 4.7 Uji Simultan (F)	64
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	47
Gambar 4.2 Uji Normalitas	57
Gambar 4.3 Uji P-P Plot.....	58
Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak merupakan salah satu sektor pendukung bagi pemerintahan dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya demi tercapainya apa yang direncanakan maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memungut pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Dalam pemungutan pajak dari masyarakat masih kurang efektif dan banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Instansi pemerintahan dalam pemungutan pajak pada masyarakat adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukannya pada tanggal 1 Januari tahun 2001 yang menghendaki daerah untuk dapat bereaksi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga sendiri melalui sistem otonomi daerah.

Inisiasi diberikannya otonomi kepada daerah membawa konsekuensi bahwa pemerintah daerah dituntut untuk lebih menyiapkan diri dalam menghadapi era otonomi daerah. Implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, karena kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap tugas atau kegiatan pekerjaan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintah daerah provinsi dapat diselenggarakan sendiri atau menugaskan sebagian urusan pemerintah tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas perbantuan.

Untuk dapat merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembuatan pemerintahan daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan untuk membangun perekonomian daerah itu sendiri. Dengan begitu, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri.

Efektifitas pembangunan di Provinsi Sumatera Utara tidak lepas dari pengolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Daerah dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah yaitu dengan penerimaan pajak dan retribusi.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat.

Penghasilan daerah salah satunya merupakan hasil dari pajak daerah dan pajak retribusi daerah yang dijelaskan dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang pendapatan pasal 285. Fungsi pajak dari penghasilan daerah bisa digunakan

untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Semakin tinggi biaya untuk memperbaiki ekonomi maka daerah juga semakin tinggi memberikan hasil pendapatan ke pemerintah pusat yang akan dikelola untuk seluruh negara. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak daerah yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi (Pajak Provinsi), berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, dan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap, yang dikenal dengan sebutan SAMSAT. Dimana pada umumnya kantor cabang SAMSAT berada di Jalan Sisingamangaraja KM 59, Sitirejo III, Medan Amplas, Harjosari I, Medan Amplas. Realisasi pendapatan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 per tanggal 28 Desember 2017 mencapai Rp 12.116.867.365.967,60 jumlah tersebut memenuhi 97,58 persen target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 12.417.425.444.814,00. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara, Sarmadan Hasibuan menjelaskan, masih ada kekurangan dari target pendapatan dari P-APBD Sumut sebesar Rp 300.558.078.846,37.

Sedangkan untuk Pajak Daerah Provinsi Sumut TA 2017, ungkap Sarmadan, hingga 28 Desember 2017 telah terealisasi sebesar 103,31 persen atau Rp 4.765.696.317.963,04 dari target yang ditentukan sebesar Rp 4.612.951.603.549,00.

Pajak daerah tersebut, kata Sarmadan, bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dengan realisasi sebesar Rp 1.786.261.407.885 dari target sebesar Rp 1.702.482.587.800, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan realisasi sebesar Rp 1.227.915.225.137 dari target sebesar Rp 1.138.834.714.440. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan realisasi sebesar Rp 755.528.074.770 dari target sebesar Rp 792.019.290.000, Pajak Air Permukaan dengan realisasi sebesar Rp 78.985.882.527 dari target sebesar Rp 84.908.242.000 dan Pajak Pokok dengan realisasi sebesar Rp 844.022.870.886 dari target sebesar Rp 833.283.172.000 (<http://humas.sumutprov.go.id>). Dengan demikian, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan provinsi.

Dari informasi tersebut, peneliti membatasi objek penelitian dengan hanya melingkupi pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Ini dikarenakan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi yang memiliki potensi yang semakin meningkat di masyarakat. Sehingga diharapkan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pemerintahan untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Yang dalam pengertiannya kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan

darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor. Sedangkan bea balik nama kendaraan adalah penyerahan atas hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang dijadikan karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Karena itu, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara, selalu berupaya keras agar dapat mencari pendanaan yang berguna untuk membiayai pembangunan yang salah satunya adalah dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan hadirnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga penanggung jawab dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pengolahan pendapatan asli daerah.

Dengan alasan itulah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

” Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang di atas diketahui bahwa yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Masih ada kekurangan dari target pendapatan dari APBD Sumut sebesar Rp 300.558.078.846,37 tahun 2017.
- b. Masih minimnya fungsi pajak daerah untuk memenuhi kepentingan umum.

2. Batasan Masalah

Dalam penulisan laporan ini, penulis membatasi masalah yang diteliti pada pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, sehingga tidak dibahas dari sumber-sumber pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara yang lain.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara dari tahun 2013 hingga 2017?
2. Apakah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara dari tahun 2013 hingga 2017?

3. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara dari tahun 2013 hingga 2017?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 sampai dengan 2017.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 sampai dengan 2017.
- c. Untuk mengetahui jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 hingga tahun 2017 telah efektif.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

- a. Aspek teoritis

Dalam aspek teoritis, manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan
- 2) Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan.

b. Aspek praktis

Dalam aspek praktis, manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam mengelolah penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Khaeril Anwar J (Universitas Hasanuddin Makasar, 2014) yang berjudul : Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan penelitian ini berjudul Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Berikut ini adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. **Model Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan model penelitian analisis deskriptif. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan model penelitian regresi linier berganda.
2. **Variabel Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan 1 (satu) variabel bebas (pajak kendaraan bermotor) dan 1 (satu) variabel terikat (pendapatan asli daerah). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas (pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor) dan 1 (satu) variabel terikat (pendapatan asli daerah).
3. **Waktu Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.
4. **Lokasi Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan di dinas pendapatan provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Dinas Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah provinsi Sumatera Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak dan Ciri Pajak

Di Indonesia, pajak merupakan sumber keuangan negara yang paling utama yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pajak bersifat paksaan, seperti tertuang dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama pemerintah.

Menurut Resmi (2013:2), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Djajadiningrat (2011:1) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang merupakan rubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan Tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 maka pajak memiliki ciri-ciri. adapun ciri-ciri pajak yaitu :

- 1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan Pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor negara.
- 3) Pemungutan Pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi Pemerintahan, bagi rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh Pemerintah terhadap Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP).
- 5) Selain fungsi *budgetair* yaitu fungsi untuk mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pajak juga berfungsi untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (*regulair*).

b. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2011), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terhutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya .
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Barang Mewah (PPnBM).
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak terdiri dari tiga macam, yaitu:

1) Asas Domisili atau Tempat Tinggal

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Asas ini dipakai pada PPH WP Orang Pribadi atau Badan di Indonesia sehingga setiap WP Dalam Negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia dan dari luar Indonesia (*world-wide income* atau *global income*).

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal WP apakah di wilayahnya atau diluar wilayahnya. Setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia dikenakan PPh.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang WP. Contohnya adalah pajak bangsa asing yang dahulu pernah berlaku di Indonesia, besarnya pajak ini berbeda sesuai dengan kewarganegaraan atau kebangsaan seorang WP.

Menurut Priantara (2013:7), dalam pemungutan pajak terdapat beberapa system pemungutan pajak, yaitu :

a) *Official Assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat penetapan pajak dari aparatur pajak.

b) *Self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada

WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

c) *Full self assesment system* yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

d) *Semi full self assesment* yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *self assesment* dan *official assesment*.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Lapangan Pajak Daerah hanya sebatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh negara (pusat). Sebaliknya, negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

- 1) Pajak-pajak Provinsi terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Pokok
- 2) Pajak-pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) BPHTB

3. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat yang bergerak yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2) Subjek Pajak atas Kendaraan Bermotor adalah :

- a) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- b) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- c) Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

c. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditentukan oleh hasil perkalian dari dua unsur pokok yaitu Nilai Jual kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Secara umum, tarif pajak kendaraan bermotor pada UU PDRD sebagai berikut:

Tarif pajak kendaraan bermotor yang dipakai perorangan:

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/ TNI/POLRI, pemerintahan daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

e. Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor biasanya ditentukan oleh pemerintah dalam suatu tabel yang diterbitkan setiap tahun.

f. Cara Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor dihitung setahun sekali. Adapun pemungutan pajaknya dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat tanda nomor kendaraan, biasanya berupa cap pembayaran pajak di

lembar STNK. Setelah pajak yang terhutang dihitung, pembayaran pajak dilakukan di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau melalui tempat-tempat tertentu yang ditentukan oleh pemda setempat.

Sifat dari pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah pembayaran dimuka untuk satu tahun kedepannya. Cara bayar pajak dimuka seperti ini memungkinkan pembayar pajak untuk meminta kembali pajak yang lebih bayar atau tidak seharusnya terhutang. Sebagaimana tersebut dalam pasal 8 UU PDRD, untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar/ luar biasa (*force majeure*) dimana masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Namun pada praktiknya belum pernah diberitakan media suatu kejadian prestitusi pajak kendaraan bermotor di Indonesia.

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang “Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha”.

b. Objek dan Subjek Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dipungut atas pajak penyerahan kendaraan bermotor. Penyerahan kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud diatas adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di daerah (Indonesia) kecuali:

- 1) Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
- 2) Untuk diperdagangkan
- 3) Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabrikan Indonesia
- 4) Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.

Pengecualian sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku apabila 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan dari wilayah pabrik Indonesia. Dikecualikan sebagai objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah:

- 1) Kereta api.
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- 4) Dan objek pajak lainnya yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi yang menerima kendaraan bermotor.

Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:

- 1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisannya.
- 2) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan nilai jual kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga jual umum (HPU), atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku, dan apabila tidak ada tabel maka nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor:

- 1) Isi silinder dan satuan bermotor
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor
- 3) Jenis kendaraan bermotor
- 4) Tahun pembuatan kendaraan bermotor
- 5) Tahun kendaraan bermotor
- 6) Merek kendaraan bermotor
- 7) Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diijinkan
- 8) Dokumen untuk impor dan jenis kendaraan bermotor tertentu

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tarif BBN – KB atas penyerahan pertama sebesar:
 - a) 10% untuk Kendaraan Bermotor bukan umum
 - b) 10% untuk Kendaraan Bermotor umum
 - c) 3% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat berat dan alat-alat besar
- 2) Tarif BBN – KB atas penyerahan kedua:
 - a) 1% untuk Kendaraan Bermotor bukan umum
 - b) 1% untuk Kendaraan Bermotor umum
 - c) 3% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- 3) Tarif Kendaraan Bermotor karena warisan ditetapkan:
 - a) 0,1% untuk Kendaraan Bermotor bukan umum
 - b) 0,1% untuk Kendaraan Bermotor umum
 - c) 0,3% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat.

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan peneyelenggaraan pemerintahan daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal/angka 18 bahwa, “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Halim (2011), “Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2011:10), “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan hasil setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah”.

b. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan

mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang.

Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang- undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
- d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

2) Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a) Retribusi tersebut dipungut oleh pemerintah daerah;
- b) Dalam pungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis;
- c) Terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan;
- d) Retribusi tersebut dikenakan pada setiap orang atau suatu badan yang menggunakan/ atau mengenyam jasa-jasa yang di siapkan negara;
- e) Kontribusi retribusi tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota yang relatif tetap dan perlu mendapat perhatian serius bagi daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Mardiasmo (2011:16), “Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan antara lain bagian laba, devisien dan penjualan saham milik daerah”.

Jenis pendapatan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a) Bagian laba atas penyerahan modal perusahaan milik daerah (BUMD).
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN).
- c) Bagian laba atas penyertaan modal usaha milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h) Pendapatan denda pajak;

- i) Pendapatan denda retribusi;
- j) Pendapatan eksekusi atas jaminan;
- k) Pendapatan dari pengembalian;
- l) Fasilitas sosial dan umum;
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n) Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan;

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisa	Hasil Penelitian
1	Khaeril Anwar J (Universitas Hasannudin Makassar, 2014)	Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Potensi Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah	Analisis deskriptif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi pada pajak kendaraan bermotor terhadap PAD tahun 2009 – 2013 di Sulawesi Selatan dengan kriteria laju pertumbuhan pendapatan daerah yang cukup besar
2	Reza Primansyah (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun	Pajak Kendaraan Roda Dua dan Pajak Kendaraan Roda Empat	Pendapatan Asli Daerah	Analisis Kuantitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak kendaraan roda dua dan pajak kendaraan roda empat tidak berpengaruh besar dalam PAD

4	Fransiska Andar Rosalina (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010)	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah	Analisis deskriptif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD pada tahun 2006 mengalami penurunan akan tetapi kontribusi pajak bea balik nama terhadap PAD pada tahun 2006 mengalami kenaikan
---	---	--	--	------------------------	---------------------	--

Berikut ini adalah perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini :

1. Khaeril Anwar J (Universitas Hasannudin Makasar, 2014) dengan judul Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan 1 variabel bebas yaitu potensi pajak kendaraan bermotor dan menggunakan model analisis deskriptif. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan menggunakan model regresi linier sederhana.
2. Reza Primansyah (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan 2 variabel bebas yaitu Pajak Kendaraan Roda Dua dan Pajak Kendaraan Roda Empat, dan menggunakan data penelitian terdahulu diambil dari tahun 2007-2011. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan menggunakan data penelitian dari tahun 2014-2016.

3. Fransiska Andar Rosalina (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010) menggunakan model analisis deskriptif dan lokasi penelitian dilakukan di Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dan lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

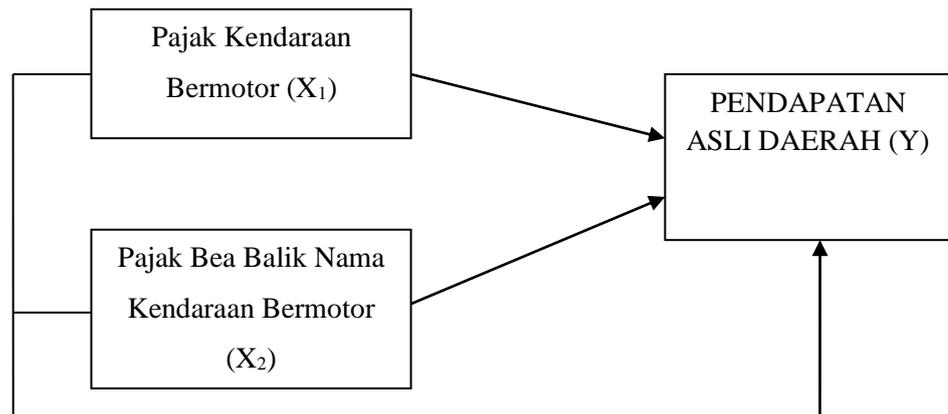
C. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono, (2014:60) “Kerangka konseptual adalah tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber keuangannya sendiri dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Salah satu sumber penerimaan terbesar dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Dengan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pemerintah dapat berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan pungutan pajak bagi wajib pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut Rusiadi dkk (2014) “ Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data/informasi yang dikumpulkan melalui sampel”.

Adapun hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini adalah :

1. Pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
2. Pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
3. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Rusiadi dkk (2014) “Penelitian asosiatif/ kolerasional/ kuantitas/ hubungan/ pengaruh merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala”. Dengan variabel bebas yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Badan Pengelolahan Pajak Retribusi dan Daerah Provinsi Sumatera Utara di Jl. Serba Guna No. 10 Medan Helvetia, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan selesai, dengan format berikut :

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	2019																																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				October			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Awal/ Pengajuan Judul	■	■	■	■																																				
2	Penyusunan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
3	Seminar Proposal																																								
4	Perbaikan Proposal																																								
5	Pengolahan Data																																								
6	Penyusunan Skripsi																																								
7	Bimbingan Skripsi																																								
8	Sidang																																								

Sumber: Penulis (2019)

C. Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama Pajak Kendaraan Bermotor (X_1), variabel bebas kedua Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2), dan variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dan untuk mengetahui baik dan buruknya suatu penelitian yang berdasarkan atas hal yang diamati secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan defenisi atau gabungan keduanya, yang ada di lapangan.

Tabel 3.2
Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	1. Jumlah Pungutan PKB	Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya (UU No. 28 tahun 2009).	Rasio
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)	1. Jumlah Pungutan BBN-KB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010)	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan asli daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim, 2011:101).	Rasio

D. Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya (Sugiyono, 2013:117).

Dari pengertian populasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dari penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor untuk seluruh jenis kendaraan.

2. Sampel

Menurut Suharsimi (2013:174), “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh (sampel sensus). Sampel jenuh dalam penelitian ini adalah Pajak kendaraan bermotor tahunan untuk kendaraan beroda dua dan beroda empat atau lebih yang ada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2013 s/d 2017.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui buku teori, karya ilmiah, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dan objektif untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan yang bersifat lisan maupun tulisan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari peraturan – peraturan perpajakan dan laporan – laporan yang berkaitan dengan perpajakan. Arsip data ini meliputi keterangan mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Studi kepustakaan dalam hal ini adalah dengan membaca dan mempelajari lebih mendalam berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari studi ini adalah dengan membandingkan kenyataan dengan teori yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Data diolah dengan bantuan software SPSS seri 16.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y	= Pendapatan Asli Daerah
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi Berganda
X_1	= Pajak Kendaraan Bermotor
X_2	= Bea Balik Nama
ϵ	= eror

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier yang berbasis ordinary least square (OLS).

a. Uji Normalitas

Menurut Rusiadi dkk (2014:158) “Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal”. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik. Uji normalitas dilakukan pada nilai residual model. Asumsi normalitas dapat diperiksa dengan pemeriksaan output normal P-P plot. Asumsi normalitas terpenuhi ketika penyebaran titik-titik output plot mengikuti garis diagonal plot.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Rusiadi dkk (2014:160) “Uji multikolinieritas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya kolerasi yang signifikan antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda”. Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam suatu model.

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu :

- 1) Jika nilai *variance inflation factor* (VIP) tidak lebih dari 10 (atau dibawah 10) dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 (diatas 0,1), maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIP = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance.

- 2) Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel bebas kurang dari 0,7 (dibawah 0,7), maka model dapat dinyatakan bebas dari asumsi klasik multikolinieritas. Jika lebih dari 0,7 maka diasumsikan terjadi korelasi yang sangat kuat antar variabel bebas sehingga terjadi multikolinieritas.
- 3) Jika nilai koefisien determinan, baik dilihat dari R^2 (R-Square) diatas 0,60 namun tidak ada variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Rusiadi dkk (2014:161) “Uji heteroskedastisitas adalah pengujian asumsi residual dengan varians tidak konstan”. Harapannya, asumsi ini tidak terpenuhi karena model regresi linier berganda memiliki asumsi residual dengan varians konstan (homoskedastisitas). Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antar nilai yang diprediksi dengan Studentized Delete Residual nilai tersebut. Cara memprediksinya adalah jika pola gambar Scatterplot model tersebut adalah:

- 1) Titik data menyebar di atas dan di bawah disekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar lagi.
- 4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

d. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada kolerasi kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Rusiadi dkk (2014:162) “Jika ada masalah autokolerasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai”. Autokolerasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistic durbi waston (DW). Bila angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokolerasi.

2. Uji Hipotesis

a. Uji secara Parsial (Uji t)

Uji parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas (pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor) terhadap variabel terikat (pendapatan asli daerah). Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, dilakukan uji t, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah

Pengujian signifikan dengan kriteria pengaruh keputusan (KPK) adalah:

Terima H_0 (tolak H_a), apabila t hitung < t tabel atau Sig > a 5%

Tolak H_0 (terima H_a), apabila t hitung > t tabel atau Sig < a 5%

2. Pengaruh pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

$H_a : \beta_2 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengaruh keputusan (KPK) adalah :

Terima H_0 (tolak H_a), apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $\text{Sig} > \alpha 5\%$

Tolak H_0 (terima H_a), apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $\text{Sig} < \alpha 5\%$

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara masing-masing berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Uji Secara Simultan (Uji f)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada tingkat kepercayaan (Confidence Interval) atau level pengujian hipotesis 5%.

Hipotesis untuk pengujian secara serempak adalah :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara serempak (Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah).

H_a : minimal 1 \neq 0, artinya terdapat pengaruh signifikan secara serempak (Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah).

Pengujian menggunakan uji f dengan kriteria berpengaruh keputusan (KPK) adalah:

Terima H_0 (tolak H_a), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig > \alpha$ 5%.

Tolak H_0 (terima H_a), apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig < \alpha$ 5%

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Cara menghitung koefisien determinasi yaitu $R^2 \times 100\%$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Umum Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Pada tanggal 21 Maret 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan Sub Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Direktorat Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 137/II/GSU tanggal 21 Maret 1975 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 7/15/3/74 tanggal 7 November 1974.

Pada tanggal 31 Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Perubahan Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 1 September 1975.

Sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai institusi teknis, yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Salah satu Dinas tersebut adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (DISPENDASU). Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/ Unit Pelaksana Teknis (sebelumnya disebut cabang dinas). UPTD ini terdapat organisasi Sistem Administrasi Bersama di Bawah Satu Atap (SAMSAT). Sampai Tahun 2004, telah dibentuk sebanyak 14 unit, yang terkait dengan kantor bersama SAMSAT. Sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintah maupun tugas

dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan yang strategis “sebagai pengelola utama sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan mendanai belanja provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif”.

Terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralistis kearah desentralistis yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab pada daerah, yang juga membawa perubahan kebijakan pemerintah berbagai bidang. Penyelenggaraan otonomi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang potensial dan rasional agar dikelola dengan baik, maka Visi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dirumuskan sebagai berikut: Menjadikan Dinas Pendapatan Daerah yang Professional dan berkualitas dalam pemberdayaan potensi daerah menuju otonomi daerah yang maju dan mandiri.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk merealisasi Visi, guna memberikan arah dan tujuan yang fokus terhadap program kegiatan pengelolaan sumber pendapatan daerah maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan.
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan yang professional.

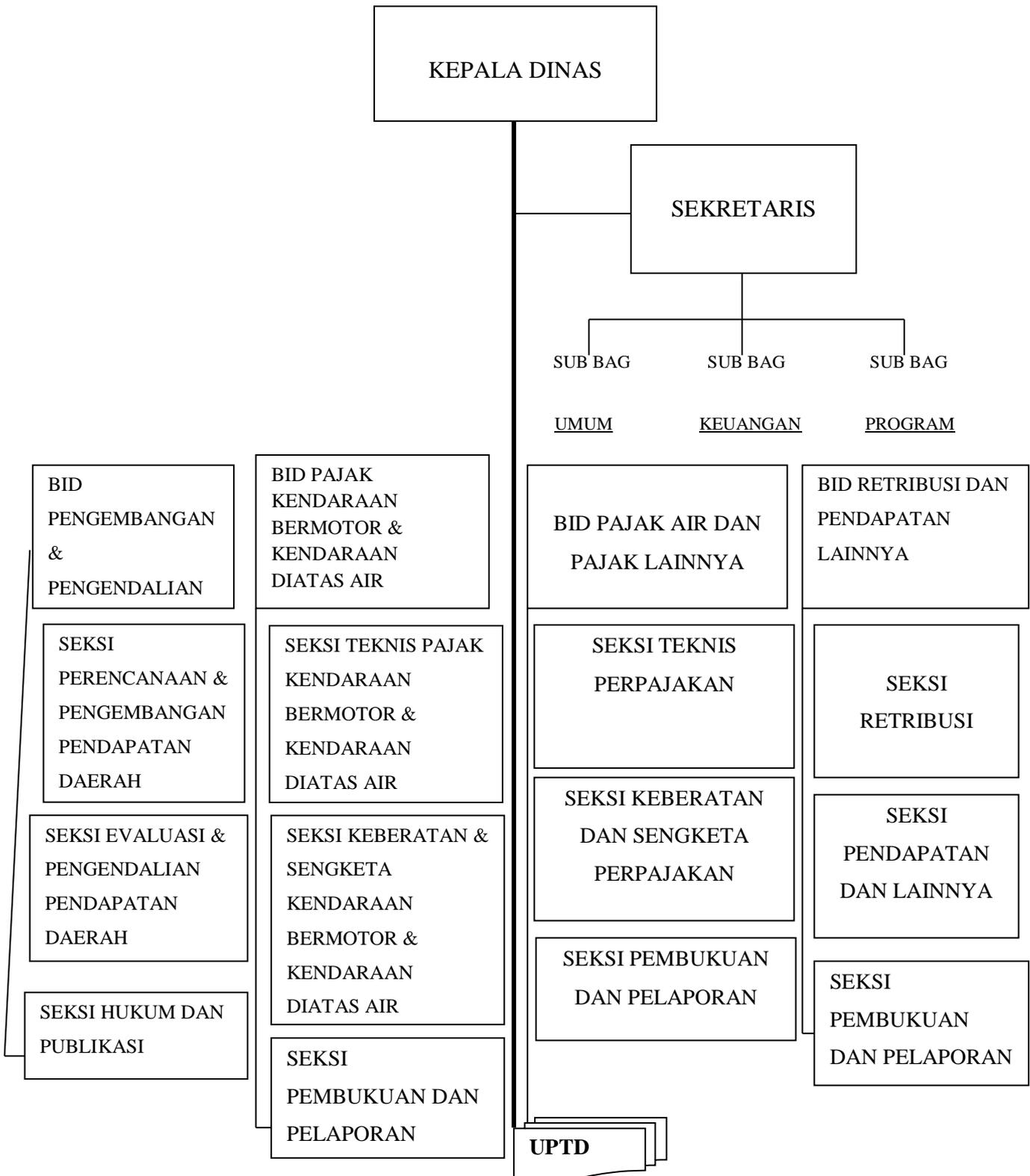
b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Dengan adanya struktur organisasi akan memudahkan dalam menuntun dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan berdasarkan tugas dan tanggung jawab.

Struktur organisasi merupakan pemisahan yang jelas bagi setiap bagian dari perusahaan. Dari struktur organisasi tersebut dapat kita lihat dengan jelas pendelegasian wewenang dari setiap tujuan bagian, pendelegasian wewenang dari setiap bagian, pendelegasian wewenang mengandung unsur-unsur tersebut setiap personalia pada perusahaan dapat menentukan sampai dimana personalia tersebut harus mempertanggung jawabkan tugas serta kewajiban.

Untuk mencapai visi dan misi perusahaan maka diperlukan organisasi yang secara efektif yang dapat menjalankan roda perusahaan yang dijabarkan dalam struktur organisasi perusahaan.

Adapun struktur organisasi Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

c. URAIAN TUGAS

1) Kepala Dinas

a) Kepala Dinas BPPRD mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas ekonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

b) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

(1) Penyiapan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standar pelaksanaan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dibidang pendapatan daerah.

(2) Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait, pembinaan, pengendalian teknis dan evaluasi panggilan potensi, pemberdayaan potensi dan pemungutan sumber yang ditetapkan.

(3) Penyusunan dan pelaksanaan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pendapatan daerah, sesuai kebijakan daerah, ketentuan dan standar yang ditetapkan.

(4) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

(5) Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur dan sekretaris daerah sesuai standar yang ditetapkan masukan yang telah ditetapkan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

c) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dibantu oleh:

1) Sekretaris,

2) Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian

- 3) Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air.
- 4) Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak lainnya.
- 5) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2) Sekretaris

- a) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum dan penyusunan program.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - (1) Penyusunan dan penyempurnaan standar penyelenggaraan urusan pemberdayaan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan administrasi umum barang/ perlengkapan serta penyusunan program.
 - (2) Perencanaan dan pengadaan, kebutuhan internal dan kebutuhan administrasi umum barang/ perlengkapan serta penyempurnaan peningkatan pengelolaan, pemeliharaan atau penggunaannya.
 - (3) Perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan organisasi dan kepegawaian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- (4) Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggung jawaban keuangan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - (5) Perencanaan dan peningkatan sistem kerja serta pengelolaan barang/perengkapan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - (6) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- c) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud point
- (1) sekretaris dibantu oleh:
 - (1) Sub Bagian Sekretaris Umum
 - (2) Sub Bagian Keuangan
 - (3) Sub Bagian Program.
- 3) Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian
- a) Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang penyusunan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah serta hukum dan publikasikan.
 - b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point(1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - (1) Penyusunan rencana strategis jangka menengah dan tahunan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan.
 - (2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah serta hukum dan publikasi sesuai ketentuan standar.

- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - (4) Pemberian yang dimasukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
 - (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai standar yang diterapkan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian dibantu oleh:
- (1) Seksi pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
 - (2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
 - (3) Seksi Hukum dan Publikasi.
- 4) Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
- a) Atas Air (PKB-KAA)
 - (1) Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disebut PKB-KAA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis perpajakan, keberatan dan sengketa PKB-KAA, pembukuan dan pelaporan PKB-KAA serta Bea Balik Nama/Kendaraan Bermotor-Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disebut BBN/KB-KAA.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang PKB-KAA, mempunyai tugas:
 - (a) Penyusunan dan penyempurnaan standar teknis pengelolaan PKB-KAA serta BNN/KB-KAA, penatausahaan dan pemberian

pertimbangan penyelesaian keberataan pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan, pembukuan dan pelaporn.

- (b) Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian program jangka menengah dan tahunan dibidang teknis perpajakan, keberataan PKB-KAA, pembukuan dan pelaporan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - (c) Penyelenggaraan koordinasi dan pengolahan data dalam pengelolaan PKB-KAA serta BBN/KB-KAA, Intensifikasi dan Ekstifikasi, Keberatan PKB-KAA, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan.
 - (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - (e) Pemberian masukan yang perlu dari Kepala Bidang PKB kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas bidang yang dimiliki oleh bagian Kepala Bidang tersebut.
 - (f) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standart yang ditetapkan.
- 1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud poin (1), Kepala Bidang PKB-KAA dibantu oleh:
- a) Seksi Teknis PKB-KAA
 - b) Seksi Keberatan dan Sengketa PKB-KAA
 - c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

5) Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya

- a) Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis perpajakan, keberatan dan sengketa perpajakan, pembukuan dan pelaporan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin (1), Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya menyelenggarakan fungsinya:
 - (1) Penyusunan dan penyempurnaan standart teknis perpajakan, keberatan dan sengketa perpajakan, pembukuan dan pelaporan sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan.
 - (2) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian program pembangunan jangka menengah dan tahunan sesuai standart yang ditetapkan rencana jangka menengah tahunan dibidang teknis perpajakan, keberatan dan sengketa perpajaka, pembukuan dan pelaporan.
 - (3) Pelaksanaan, koordinasi dan pendataan dalam pengelolaan teknis perpajakan keberatan dan sengketa perpajakan pembukuan dan pelaporan sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan.
- c) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud poin (1), kepala bidang pajak air dan pajak lainnya dibantu oleh:
 - (1) Seksi Teknis Perpajakan
 - (2) Seksi Keberatan dan Sengketa Perpajakan
 - (3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

6) Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya

a) Kepala bidang retribusi dan pendapatan lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis retribusi, pendapatan lainnya pembukuan dan pelaporan

b) Sebagaimana untuk melaksanakan tugas yang dimaksud poin (1), Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi :

(1) Penyusunan dan penyempurnaan standart teknis retribusi, pendapatan lainnya pembukuan dan pelaporannya.

(2) Pelaksanaan dan pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang retribusi dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan dan standart yang ditentukan.

(3) Pelaksanaa koordinasi bimbingan teknis sosialisasi dan penetapan dan pemungutan retribusi dan pendapatan lainnya menyiapkan bahan dalam teknis retribusi dan pendapatan lainnya, intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembukuan dan pelaporan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(5) Pemberian masukan yang perlu kepadaKepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

c) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud poin (1) Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya dibantu oleh:

- (1) Seksi Retribusi
- (2) Seksi Pendapatan Lainnya
- (3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk membaca data dan memahami maksudnya. Berikut ini merupakan hasil output SPSS yang merupakan keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 4.1 Deskriptif statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_X1	5	27.91	28.24	28.0611	.11978
LN_X2	5	27.63	28.13	27.8329	.19453
LN_Y	5	29.04	29.23	29.1660	.08481
Valid N (listwise)	5				

Sumber : Hasil Olahan SPSS Versi 17.0

Dari hasil data statistik deskriptif diatas menunjukkan jumlah data (N) sebanyak 5 sampel yang dapat digunakan. Pajak kendaraan bermotor memiliki nilai minimum pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.322.297.249.446, sedangkan pada tahun 2017 pajak kendaraan bermotor memiliki nilai maksimum sebesar Rp. 183.488.314.387. Nilai standar deviasi pajak kendaraan bermotor sebesar 0.11978 < dari nilai mean sebesar 28.0611, hal ini menunjukkan data berdistribusi normal.

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor memiliki nilai minimum pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.137.348.684, sedangkan pada tahun 2013 pajak bea balik nama kendaraan bermotor memiliki nilai maksimum

sebesar Rp. 1.642.020.791.912. Nilai standar deviasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar $0.19453 <$ dari nilai mean sebesar 27.8329, hal ini menunjukkan data berdistribusi normal.

Pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum pada tahun 2014 sebesar Rp. 4.416.811.865.267, sedangkan pada tahun 2017 pendapatan asli daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp. 4.925.627.725.733. Nilai standar deviasi pendapatan asli daerah sebesar $0.08481 <$ dari nilai mean sebesar 29.1660, hal ini menunjukkan data berdistribusi normal.

Tabel 4.2 Tabulasi Per Variabel

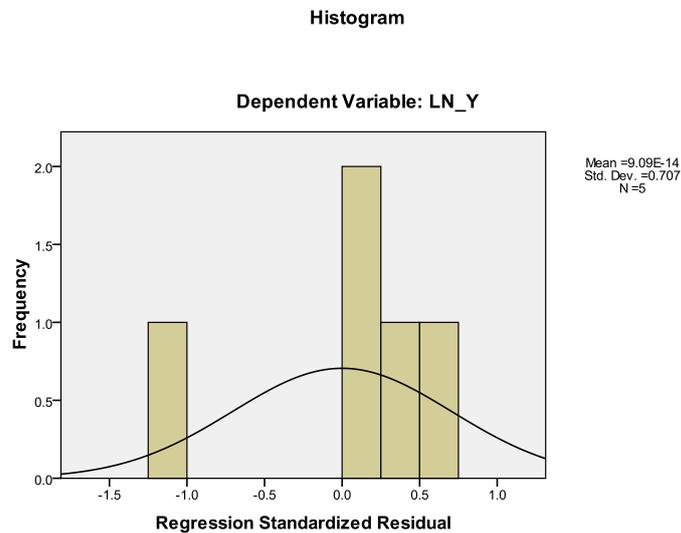
Tahun	PKB	BBN-KB	PAD
2013	Rp 1.322.297.249.446	Rp 1.642.020.791.912	Rp 4.091.285.888.816
2014	Rp 1.487.025.132.838	Rp 1.280.765.662.422	Rp 4.416.811.865.267
2015	Rp 1.492.135.513.686	Rp 1.000.137.348.684	Rp 4.883.880.619.308
2016	Rp 1.595.518.645.757	Rp 1.054.952.255.633	Rp 4.954.833.100.869
2017	Rp 1.834.883.314.387	Rp 1.236.735.144.956	Rp 4.925.627.725.733

Berdasarkan tabel tabulasi per variabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) pada tahun 2013 memiliki nilai minimum sebesar Rp. 1.322.297.249.446,- sedangkan nilai maksimum pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.834.883.314.387,-. BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) memiliki nilai minimum pada tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 1.000.137.348.684,- sedangkan nilai maksimum berada pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.642.020.791.912. PAD (Pajak Asli Daerah) pada tahun 2013 memiliki nilai minimum sebesar Rp. 4.091.285.888.816,- sedangkan nilai maksimum pada tahun 2016 sebesar Rp 4.954.833.100.869,-.

3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

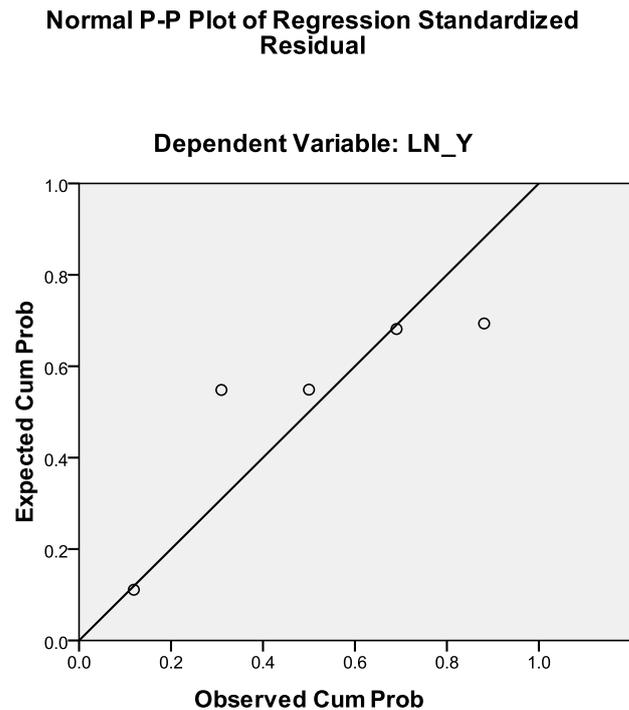
Untuk menguji apakah penelitian ini berdistribusi normal atau tidak dapat dideteksi melalui 2 cara yaitu:



Gambar 4.2 Uji Normalitas

Sumber: Hasil Olahan SPSS Versi 17.0

Hasil Histogram diatas memberikan pola distribusi data mengikuti kurva berbentuk lonceng yang tidak menceng kiri maupun menceng kanan. Sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.



Gambar 4.3 Normal P-P Plot

Sumber: Hasil Olahan SPSS Versi 17.0

Berdasarkan gambar diatas menyatakan bahwa hasil dari uji Noemalitas menggunakan grafik normal P-P Plot titik-titik menyebar disekitar garis diagonal agak mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dapat dilihat dari *tolerance* atau nilai *variance inflation factor*. Batas *tolerance* sebesar 0.1 dan VIF sebesar 10.

Tabel 4.3 Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	27.730	3.785		7.327	.018					
LN_X1	.339	.097	.479	3.505	.073	.790	.927	.424	.783	1.278
LN_X2	-.290	.060	-.666	-4.874	.040	-.889	-.960	-.589	.783	1.278

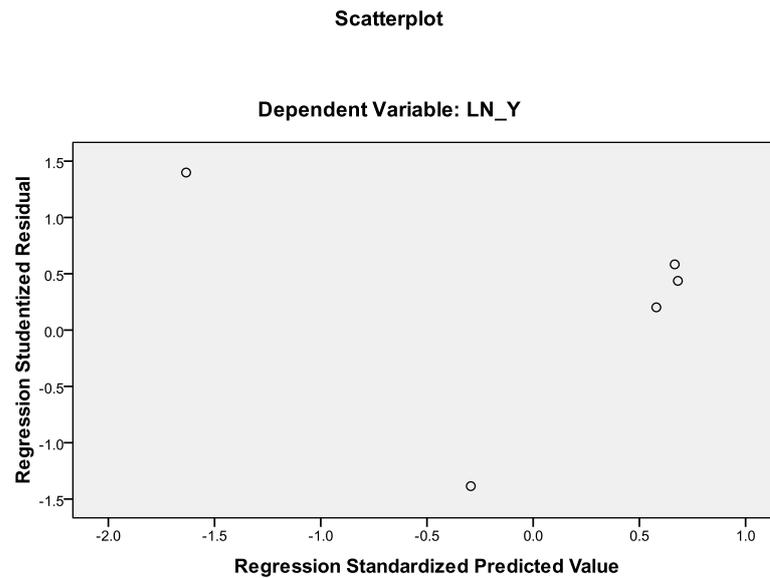
a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber : Hasil Olahan SPSS 17.0

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa angka VIF < 10 adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar $1.278 < 10$. Nilai tolerance pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor > 0.10 sehingga data tersebut terbebas dari multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Olahan SPSS Versi 17.0

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain, masalah ini timbul karena ada kesalahan pengganggu yang tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Hasil dari uji autokolerasi dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4 Uji Autokolerasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.985 ^a	.971	.942	.02051	.971	33.197	2	2	.029	2.515

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1

b. Dependent Variable: LN_Y

Sumber : Hasil Olahan SPSS Versi 17.0

Hasil pengujian diatas dapat dilihat dari D-W sebesar 2.515 dan di sebesar 1.585, maka penelitian ini berada diantara $du < DW (1,585 < 2.515)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdapat gejala autokorelasi dan penelitian ini dapat dilanjutkan.

4. Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas.

Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	27.730	3.785		7.327	.018					
	LN_X1	.339	.097	.479	3.505	.073	.790	.927	.424	.783	1.278
	LN_X2	-.290	.060	-.666	-4.874	.040	-.889	-.960	-.589	.783	1.278

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber : Hasil Olahan SPSS Versi 17.0

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 27.730 + 0.339X_1 - 0.290X_2$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

- a. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai pendapatan asli daerah (Y) adalah sebesar 27.730.
- b. Jika terjadi peningkatan pajak kendaraan bermotor 1 satuan maka pendapatan asli daerah (Y) akan meningkat sebesar 0.339.
- c. Jika terjadi penurunan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah (Y) akan menurun sebesar 0.290.

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (uji t)

Jika nilai signifikan $t < 0.5$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 5 %.

Tabel 4.6 Uji Parsial (t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27.730	3.785		7.327	.018
LN_X1	.339	.097	.479	3.505	.073
LN_X2	-.290	.060	-.666	-4.874	.040

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber : Hasil Olahan SPSS Versi 17.0

Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahawa:

- 1) Nilai signifikan (Sig.) variabel pajak kendaraan bermotor (X1) sebesar $0.073 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.
- 2) Nilai signifikan (Sig.) variabel pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar $0.040 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji f)

Hasil uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara serentak. Cara yang digunakan adalah dengan melihat signifikan sebesar 5%.

Tabel 4.7 Uji Simultan (f)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.028	2	.014	33.197	.029 ^a
	Residual	.001	2	.000		
	Total	.029	4			

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1

b. Dependent Variable: LN_Y

Sumber : Hasil Olahan SPSS Versi 17.0

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel pajak kendaraan bermotor (X1) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (X2) sebesar $0.029 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

c. Koefisien Determinasi

Dari pengolahan data dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS 17.0 maka diperoleh hasil seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.985 ^a	.971	.942	.02051	.971	33.197	2	2	.029	2.515

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1

b. Dependent Variable: LN_Y

Sumber : Hasil Olahan SPSS 17.0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari *Adjusted R Square* sebesar 0.942 yang dapat disebut koefisien determinasi sebesar 94.2% hal ini berarti pendapatan asli daerah diperoleh dan dijelaskan oleh pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya 5.8% dijelaskan oleh faktor lain misalnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan diatas air dan pajak bea balik nama kendaraan di atas air.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil perhitungan regresi maka diperoleh nilai koefisien untuk kebijakan penetapan harga sebesar 0.339 dapat diketahui signifikannya sebesar 0.073 maka dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor terbukti tidak dapat diterima. Hasil ini konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Reza (2013) yang menyatakan bahwa kendaraan roda dua tidak mempengaruhi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah hal ini berarti tidak terdapat kontribusi terhadap pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil perhitungan regresi maka diperoleh nilai koefisien untuk lokasi sebesar -0.290 dan signifikan sebesar $0.040 < 0.05$ dan dapat disimpulkan bahwa pajak bea balik nama kendaraan bermotor mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga pada penelitian ini menyatakan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah terbukti dan dapat diterima. Hasil ini konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Fransiska (2010) yang menyatakan bahwa bea balik nama

kendaraan bermotor mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulannya yaitu :

1. Secara uji persial dapat diambil kesimpulan bahwa pajak kendaraan bermotor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan memiliki nilai *Adjusted R Square* sebesar
2. Secara uji persial dapat diambil kesimpulan pajak bea balik nama kendaraan bermotor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Secara uji simultan dapat diambil kesimpulan bahwa pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis memberi beberapa saran yaitu :

1. Bagi pemerintah daerah agar lebih meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD.
2. Bagi dinas pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara agar lebih menggali lagi potensi penerimaan pajak.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan membuat data dengan rentan data dengan periode yang lebih panjang dan menggunakan data yang lengkap serta menambah variabel independen dalam penelitian sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2011). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4: Salemba Empat.
- Andar Rosalina Fransiska, (2008). *Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Darise, Nurlan (2009). *Pengelolaan keuangan daerah. Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif*.
- Diana, (2011:82). *Sistem Informasi dan Akuntansi*, Yogyakarta.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan.
- Khaeril Anwar J, (2014). *Analisis kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi sulawesi selatan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanuddin, Makassar.
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*. Atlantis Press.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.

- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Priantara, 2013. *Perpajakan Indonesia. Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Reza P, (2013). *Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten karimun*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Rusiadi, dkk. 2014. *Metode Penelitian, Manajemen Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel*. Medan: USU Press.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.